

PENYUSUNAN KONSEP *SUSTAINABLE VILLAGE* MELALUI ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN JEMBER

Siska Aprilia Oktaviani^{1*}, Berlina Yudha Pratiwi², Taufik Kurrohman³
^{1,2}Politeknik Negeri Jember, Jl. Mastrip Po Box 164 Jember, Indonesia
³Universitas Jember, Jl. Kalimantan Tegalboto No.37 Jember, Indonesia
*Korespondensi: siska_aprilia@polije.ac.id

Abstrak

Artikel ini disusun untuk menyusun konsep sustainable village melalui eksplorasi mendalam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Jember. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Dana Desa dapat dikonfigurasi untuk mendukung konsep Desa Berkelanjutan (*Sustainable Village*). Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif dengan mengolah data APBDes dari 223 desa di Kabupaten Jember hingga terbentuk konsep sustainable village. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat potensi pada desa-desa dengan alokasi dana yang memprioritaskan pembelanjaan pada infrastruktur, seperti Yosorati, Mulyorejo, dan Darungan cenderung dapat menerapkan konsep sustainable village dibandingkan dengan desa-desa yang memiliki alokasi yang lebih rendah di kategori yang sama. Artikel ini menggarisbawahi pentingnya pengintegrasian prinsip keberlanjutan dalam perencanaan dan penganggaran Dana Desa untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup saat ini tetapi juga melestarikan lingkungan untuk masa depan.

Kata kunci: APBDes, Keberlanjutan, Desa Berkelanjutan

Abstract

This article is designed to develop the concept of a sustainable village through an in-depth exploration of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Jember Regency. The primary focus of this research is to understand how Village Funds can be configured to support the concept of a Sustainable Village. This study uses descriptive quantitative analysis methods by processing APBDes data from 223 villages in Jember Regency to form the concept of a sustainable village. The results indicate that villages allocating funds with a priority on infrastructure spending, such as Yosorati, Mulyorejo, and Darungan, are more likely to implement the concept of a sustainable village compared to villages with lower allocations in the same category. This article highlights the importance of integrating sustainability principles into the planning and budgeting of Village Funds to ensure that development not only improves current living quality but also preserves the environment for the future.

Keywords: APBDes, Sustainability, Sustainable Village

PENDAHULUAN

Desa merupakan entitas administratif terkecil dan sering kali berada di bawah pengawasan pemerintah lokal (Maksimilianus et al., 2020; Nurjaman, 2015). Di Indonesia, desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah yang memiliki otonomi tertentu dan dipimpin oleh kepala desa (Adnan, 2019; Paru et al., 2019; Sajangbati, 2015). Desa umumnya memiliki populasi yang lebih kecil dibandingkan dengan kota. Wilayah desa cenderung berupa lahan yang luas dan seringkali digunakan untuk pertanian atau kegiatan lain yang terkait dengan sumber daya alam. Wilayah desa yang luas menyebabkan ekonomi desa sering kali berbasis agraris. Namun demikian, telah banyak desa yang mulai melakukan diversifikasi kegiatan ekonominya termasuk pariwisata, kerajinan tangan, dan industri kecil.

Potensi ekonomi desa yang berbasis agraris kemudian menjadikan desa sebagai fokus penting dalam diskusi terkait pembangunan berkelanjutan (Soleh, 2017; Supangkat Samidjo et al., 2016). Hal ini terjadi karena potensi desa untuk mempromosikan praktik pertanian yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang efektif, dan konservasi (Arham et al., 2019). Banyak inisiatif global yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di desa dilakukan berdampingan dengan upaya menjaga lingkungan. Pada dasarnya, pembangunan

berkelanjutan telah menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pengembangan desa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia (Dharmawan and Sasmita, 2023; P3DI Setjen DPR RI, 2015). Kabupaten Jember, yang terletak di Jawa Timur, Indonesia tidak terlepas dari tantangan unik dalam kaitannya untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan dengan pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat lokal. Peningkatan keberlanjutan desa tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan desa dapat berlangsung tanpa merusak lingkungan alam. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memberikan wawasan penting tentang bagaimana dana dialokasikan dan digunakan dalam berbagai inisiatif pembangunan desa.

Penelitian ini merupakan sarana untuk menyusun konsep *Sustainable Village* dengan mendalami penggunaan APBDes di Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi cara-cara di mana alokasi anggaran desa dapat lebih diarahkan untuk mendukung inisiatif berkelanjutan, sehingga memberikan model yang dapat diadopsi oleh desa-desa lain dalam upaya menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrumen keuangan vital yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mengelola sumber daya ekonomi di tingkat lokal (Raharjo et al., n.d.). APBDes dirancang untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, serta memberdayakan masyarakat desa dalam mengambil keputusan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari (Antlöv et al., n.d.; Arifin et al., 2020; Ayu Purnamawati et al., 2023). Anggaran ini terdiri dari dua bagian utama: pendapatan dan belanja. Pendapatan desa umumnya berasal dari berbagai sumber, termasuk dana alokasi dari pemerintah pusat dan daerah, hasil usaha desa, serta sumbangan dan hibah dari pihak ketiga. Di sisi lain, belanja desa meliputi semua pengeluaran yang direncanakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Struktur APBDes dirancang untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan efektif, dengan fokus pada prioritas-prioritas pembangunan yang telah ditentukan oleh masyarakat desa melalui proses musyawarah desa. Selain itu, APBDes juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, yang crucial untuk memastikan penggunaan dana yang transparan dan bertanggung jawab (Adnan, 2019). Keberhasilan pengelolaan APBDes sangat bergantung pada kemampuan kepala desa dan aparatur desa lainnya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mendukung tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat lokal. Dengan demikian, APBDes tidak hanya berfungsi sebagai alat keuangan, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan masyarakat dan penggerak pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Pembangunan Desa Berkelanjutan

Pembangunan desa berkelanjutan adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan dengan cara yang memperhatikan keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan pelestarian lingkungan (Hapsoro and Bangun, 2020). Pendekatan ini mengakui bahwa pembangunan desa tidak hanya tentang peningkatan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga tentang memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, peluang ekonomi, dan manfaat pembangunan (Damastuti and de Groot, 2017). Dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, pembangunan desa berkelanjutan berusaha menciptakan komunitas yang tangguh, yang mampu mengadaptasi dan bertahan dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Yusuf Maolani, 2019). Ini mencakup investasi dalam pendidikan dan kesehatan, pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, serta penerapan teknologi ramah lingkungan dan inovasi yang mendukung ekonomi hijau (Permatasari et al., 2021; Sarifuddin et al., 2022; Tarlani and Sirajuddin, 2020). Dengan demikian, pembangunan desa berkelanjutan tidak hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga

memperhatikan kebutuhan generasi masa depan, memastikan bahwa pembangunan saat ini tidak mengorbankan kesejahteraan atau sumber daya yang akan dibutuhkan nanti.

Mengingat pentingnya pembangunan desa berkelanjutan dalam menciptakan masyarakat pedesaan yang adil, ekonomis, dan ekologis, analisis terhadap alokasi dana desa menjadi krusial (Arham et al., 2019). Hal ini dikarenakan alokasi dana desa berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di desa (Daeli et al., 2016). Stakeholders dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pengelolaan dan implementasi dana dengan menganalisis bagaimana dana tersebut dialokasikan dan digunakan, sehingga memungkinkan untuk menyusun strategi yang lebih efektif dan efisien (Hulu et al., 2018). Analisis ini tidak hanya memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk mendukung inisiatif yang berkelanjutan tetapi juga menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya (Cuadrado-Ballesteros and Bisogno, 2022; Frost and Rooney, 2021; PerPres Republik Indonesia Nomor 111, 2022). Sehingga, langkah esensial yang dapat diambil adalah dengan melakukan analisis alokasi dana desa. Hal ini juga dapat dilaukan untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan hari ini dapat membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat desa, lingkungan, dan ekonomi lokal. Analisis ini juga dilakukan demi mendukung visi pembangunan desa yang berkelanjutan untuk generasi saat ini dan masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif, yang merupakan jenis penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2019). Jenis penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti, dengan jenis penelitian tindakan yang dilakukan sebagai evaluasi pada sebuah kelayakan suatu program, produk, atau kegiatan tertentu, yang pada akhirnya bisa mendapatkan perbaikan agar hasilnya lebih baik. Produk atau kegiatan yang menjadi bahan evaluasi dalam penelitian ini adalah penganggaran pendapatan dan belanja desa untuk mendukung terwujudnya *sustainable village*. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data anggaran pendapatan dan belanja desa dari 223 desa di Kabupaten Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan APBDes yang efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Desa dapat memanfaatkan dana tersebut melalui pendekatan *Village Social Responsibility (VSR)*, tidak hanya untuk memperbaiki infrastruktur dan layanan dasar, tetapi juga untuk inisiatif yang mendukung keberlanjutan lingkungan. VSR memungkinkan desa untuk bekerja sama dengan perusahaan, lembaga pemerintah, dan organisasi non-profit dalam mengimplementasikan program-program yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, penggunaan energi terbarukan, dan praktek pertanian yang berkelanjutan. Desa dapat bertransformasi menjadi *Green Village* dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ini dalam pengelolaan dana, di mana pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan, menghasilkan lingkungan yang sehat dan ekonomi desa yang kuat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa saat ini, tetapi juga menjamin kesejahteraan generasi mendatang, sejalan dengan tujuan dari pembangunan desa yang berkelanjutan.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh, kemudian dibuat ringkasan akumulasi anggaran Dana Desa dari 223 desa di Kabupaten Jember. Ringkasan ini mencakup berbagai jenis pengeluaran mulai dari penggajian tetap, jaminan sosial, hingga biaya operasional dan pembangunan infrastruktur. Postur anggaran ini menunjukkan prioritas dalam penggunaan dana, seperti pengembangan jalan dan prasarana yang memiliki alokasi terbesar, diikuti oleh

belanja tidak terduga dan belanja modal gedung, bangunan, dan tanah. Pengalokasian dana yang transparan dan bertanggung jawab ini menunjukkan komitmen terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan dan bisa menjadi dasar dalam pembentukan *Village Social Responsibility* yang solid, termasuk dalam menginisiasi dan mendukung proyek-proyek *Green Village*.

Berdasarkan hasil analisis data anggaran pendapatan dan belanja desa, diperoleh data pos belanja tertinggi dan terendah secara keseluruhan dari desa-desa di Kabupaten Jember. Nominal tertinggi belanja pada anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun anggaran 2023 adalah pada pos belanja tidak terduga senilai Rp104.762.646.200. Sementara itu, nilai terendah terdapat pada pos belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp415.564.000, rincian dari akumulasi pos pendapatan dan belanja desa di Kabupaten Jember disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 1. Rincian Akumulasi Pos Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Jember

NO	KETERANGAN	NOMINAL	%
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 22,256,428,853	3.71%
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 90,989,886,276	15.16%
3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 6,877,891,396	1.15%
4	Belanja Barang Perlengkapan	Rp 28,042,329,664	4.67%
5	Belanja Jasa Honorarium	Rp 48,333,356,978	8.06%
6	Belanja Operasional Perkantoran	Rp 35,778,249,385	5.96%
7	Belanja Pemeliharaan	Rp 1,510,779,315	0.25%
8	Tunjangan BPD	Rp 14,332,839,760	2.39%
9	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	Rp 5,102,519,463	0.85%
10	Belanja Tidak Terduga	Rp 28,096,351,647	4.68%
11	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat	Rp 14,704,171,962	2.45%
12	Belanja Jasa Sewa	Rp 904,459,729	0.15%
13	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 1,222,309,925	0.20%
14	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	Rp 103,323,732,627	17.22%
15	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	Rp 52,817,562,276	8.80%
16	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp 30,576,902,531	5.10%
17	Belanja Tidak Terduga	Rp 104,762,646,200	17.46%
18	Belanja Modal Lainnya	Rp 4,725,067,711	0.79%
19	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	Rp 4,310,341,343	0.72%
20	Belanja Jasa Sewa	Rp 941,524,729	0.16%
21	Belanja Modal Pengadaan Tanah	Rp 415,564,000	0.07%
	TOTAL	Rp 600,024,915,770	

Berdasarkan data akumulasi APBDes tersebut dapat digambarkan tindakan-tindakan yang dapat direkomendasikan pada pemerintah desa (Hege et al., 2019; PerPres Republik Indonesia Nomor 111, 2022), antara lain seperti:

1. Menyediakan Infrastruktur Ramah Lingkungan

Melalui dana yang dialokasikan untuk Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan dapat digunakan untuk membangun jalan dengan material yang ramah lingkungan atau dengan desain yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, salah satunya seperti penggunaan permeable paving yang memungkinkan penyerapan air hujan. Alokasi terbesar ini menunjukkan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar. Untuk mendukung Sustainable Village, proyek jalan bisa menggunakan material yang lebih ramah lingkungan dan metode konstruksi yang mengurangi dampak pada ekosistem sekitar. Pembangunan jalan yang baik juga dapat mendukung keberlanjutan dengan mempermudah akses ke pasar bagi produk pertanian lokal, serta mengurangi emisi karbon dengan mengurangi jarak tempuh transportasi.

2. Pengelolaan Sumber Daya Air yang Efektif

Melalui pos Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan, pemerintah desa dapat berinvestasi pada teknologi dan metode yang berkelanjutan seperti sistem pengelolaan air hujan, pengolahan air limbah yang ramah lingkungan, dan fasilitas pengomposan untuk pengelolaan sampah organik. Investasi dalam sistem pengelolaan air dan sampah yang efisien adalah fondasi utama dari Sustainable Village. Sistem irigasi yang efisien dapat mengurangi pemborosan air, sedangkan fasilitas pengolahan air limbah dan sampah yang baik dapat mencegah polusi dan menjaga kebersihan lingkungan.

3. Pembangunan Gedung Berkelanjutan

Melalui Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Tanah, pemerintah desa dapat memperuntukkan konstruksi yang menggunakan energi dan sumber daya yang efisien, termasuk penggunaan energi terbarukan dan bahan bangunan yang berkelanjutan. Pengembangan gedung dan bangunan dengan prinsip green architecture yang memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi bisa menjadi bagian dari Sustainable Village. Pembangunan taman juga dapat meningkatkan kualitas udara dan menyediakan ruang hijau untuk masyarakat.

4. Edukasi dan Keterlibatan Masyarakat

Melalui pos Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat, perangkat desa dapat mencakup program-program edukasi tentang keberlanjutan dan pelatihan untuk masyarakat desa dalam praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan, pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya alam.

5. Konservasi Tanah

Pos anggaran Belanja Modal Pengadaan Tanah dapat digunakan untuk memperoleh lahan untuk ruang terbuka hijau, pertanian berkelanjutan, atau konservasi sumber daya alam.

6. Darurat dan Adaptasi Iklim

Pos Anggaran Belanja Tidak Terduga, merupakan pos anggaran yang dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti penghijauan, pembangunan breakwater alami untuk melindungi dari abrasi, dan lainnya. Dana ini bisa menjadi sumber daya yang penting untuk merespon cepat terhadap bencana alam atau masalah lingkungan tak terduga, memastikan resiliensi komunitas desa terhadap perubahan iklim dan kondisi ekstrem lainnya.

7. Pembangunan Berbasis Masyarakat

Perangkat desa dapat mengintegrasikan praktik-praktik yang mendukung sustainable village dengan adanya dukungan dari pos anggaran Belanja Jasa Sewa yang dapat digunakan untuk penyewaan peralatan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

8. Sistem Jaminan Sosial

Melalui anggaran dana untuk Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu dipastikan bahwa aspek-aspek kesehatan lingkungan sudah tercakup dalam jaminan sosial, mengingat pentingnya menjaga kesehatan para pemimpin dan pengambil keputusan untuk memastikan kelanjutan inisiatif-inisiatif keberlanjutan. Membangun desa yang berkelanjutan

juga melibatkan aspek sosial, seperti memastikan bahwa kepala desa dan perangkat desa mendapatkan jaminan sosial yang memadai, yang bisa meningkatkan motivasi dan kestabilan dalam mengelola program-program desa.

Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dari APBDes ini kemudian dapat membentuk satu kesatuan konsep *sustainable village* yang ditampilkan pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Konsep Sustainable Village

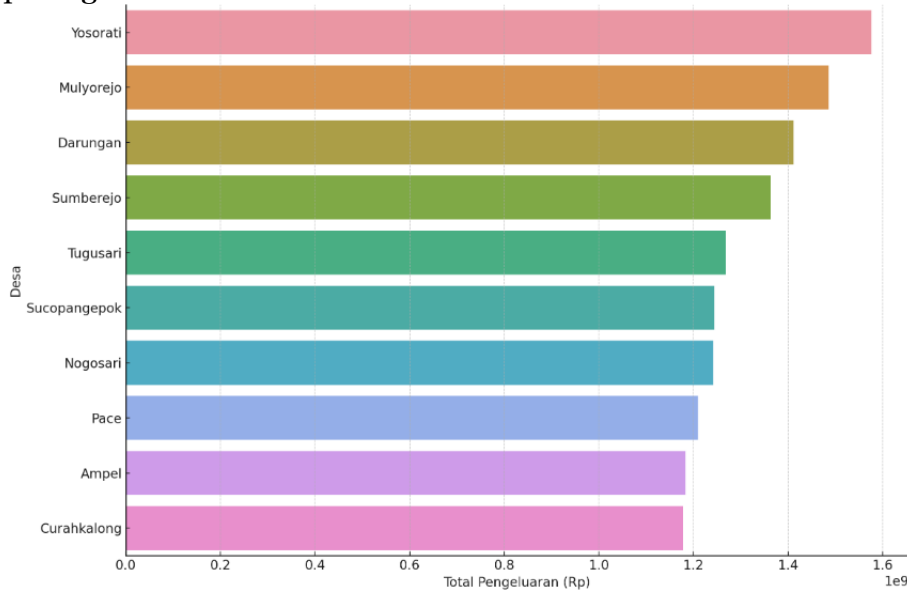
Diagram konsep yang terbentuk ini menunjukkan bahwa pembentukan *Sustainable Village* atau desa berkelanjutan di Kabupaten Jember mengandalkan serangkaian inisiatif yang saling terkait dan berpusat pada pembangunan yang holistik dan ramah lingkungan. Konsep ini mengintegrasikan berbagai elemen mulai dari infrastruktur ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang efektif, hingga pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juga dapat diketahui desa-desa yang memiliki potensi untuk dapat melakukan percepatan pencapaian tujuan *Sustainable Village*. Untuk menentukan desa mana yang memiliki potensi untuk mencapai tujuan *sustainable village* (desa berkelanjutan) tercepat dan terlambat berdasarkan anggaran, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan, seperti pertimbangan jumlah pengeluaran dengan asumsi bahwa desa dengan investasi lebih besar dalam kategori yang mendukung keberlanjutan akan memiliki kemajuan yang lebih cepat menuju *sustainable village*, serta fokus pada jenis pengeluaran yang menjadi penting karena prioritas desa dalam menginvestasikan pendanaannya pada proyek yang mendukung keberlanjutan akan lebih relevan.

Pertimbangan-pertimbangan ini dapat diketahui melalui penentuan indikator pengeluaran yang mendukung keberlanjutan. Pada analisis ini, indikator pengeluaran yang dipilih adalah kategori pengeluaran yang cenderung memiliki dampak langsung pada pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur yang berkelanjutan, serta pada kesejahteraan dan layanan masyarakat, seperti belanja modal irigasi/embung/drainase/air limbah, yang merupakan anggaran yang dapat digunakan untuk melakukan investasi mendukung pengelolaan sumber daya air dan limbah yang efektif, esensial untuk keberlanjutan lingkungan, belanja modal jalan/prasarana jalan, yang merupakan anggaran esensial untuk aksesibilitas dan mobilitas dalam sebuah desa dan mempengaruhi keberlanjutan ekonomi dan sosial, belanja modal gedung, bangunan dan taman, yakni pengeluaran yang dapat digunakan untuk investasi pada gedung dan infrastruktur publik lainnya yang berkelanjutan mempromosikan efisiensi energi dan pengurangan dampak lingkungan, belanja barang perlengkapan, anggaran yang meskipun umum, namun dapat mencakup peralatan yang mendukung operasi dan layanan publik yang efisien, Belanja Barang dan Jasa yang

diserahkan kepada masyarakat, anggaran yang sering melibatkan investasi pada barang dan jasa yang langsung diserahkan kepada masyarakat, sehingga bisa mencakup aspek-aspek yang mendukung keberlanjutan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Pemilihan kategori ini berdasarkan probabilitas bahwa investasi dalam infrastruktur fisik dan layanan masyarakat yang efisien adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan. Pendekatan ini juga mengakui bahwa keberlanjutan adalah konsep holistik yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sehingga berdasarkan kategori ini dapat diketahui desa-desa yang memiliki potensi untuk dapat melakukan percepatan pencapaian tujuan *Sustainable Village* (Hege et al., 2019; PerPres Republik Indonesia Nomor 111, 2022) yang ditampilkan pada grafik 2 di bawah ini:

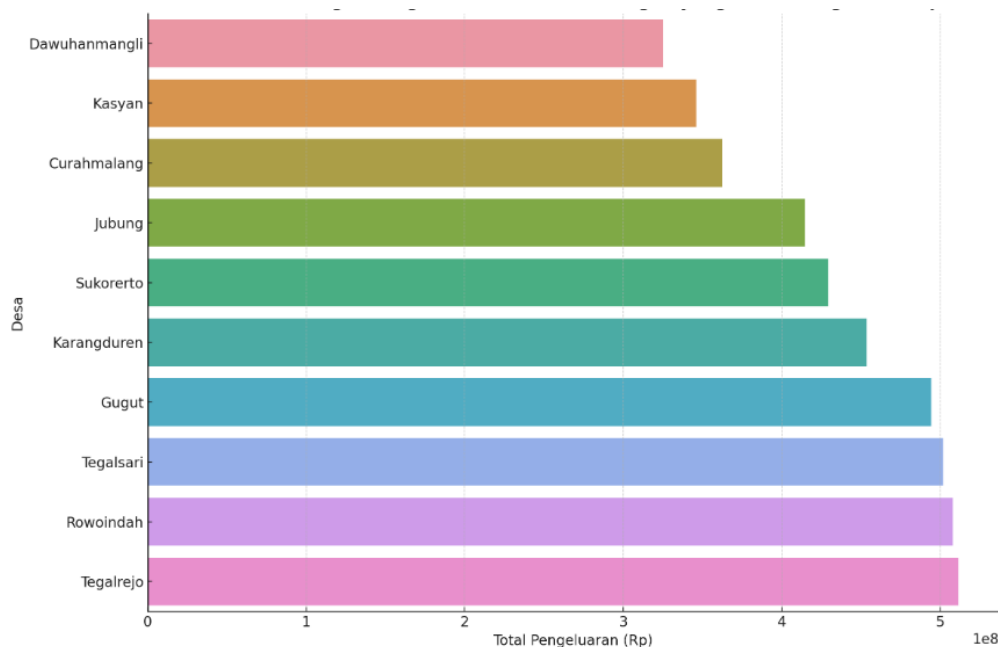


Gambar 2. Desa Dengan Potensi Percepatan *Sustainable Village* berdasarkan Kategori Anggaran yang Mendukung Keberlanjutan

Grafik di atas menunjukkan perbandingan total pengeluaran antar desa dalam kategori yang mendukung keberlanjutan atau *sustainable village*. Dapat diinterpretasikan bahwa desa dengan pengeluaran lebih tinggi di kategori ini cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mencapai tujuan keberlanjutan.

Dari grafik di atas, diperoleh bahwa Yosorati adalah desa dengan pengeluaran yang dikategorikan memiliki dampak langsung pada pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur yang berkelanjutan tertinggi, diikuti oleh Mulyorejo dan Darungan, menandakan bahwa ketiga desa tersebut memiliki probabilitas lebih cepat mencapai tujuan keberlanjutan dibanding desa-desa lainnya. Pengeluaran yang tinggi ini dapat menjadi indikasi bahwa Desa-desa tersebut dapat melakukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur, pendidikan, dan inisiatif ramah lingkungan, yang semuanya adalah komponen penting dari konsep desa berkelanjutan. Sementara itu, desa seperti Ampel dan Curahkalong memiliki pengeluaran yang lebih rendah dalam kategori ini, menunjukkan bahwa ada tantangan atau prioritas lain yang dihadapi yang mengurangi fokus atau sumber daya yang dialokasikan untuk keberlanjutan.

Selanjutnya, melalui kategori yang telah ditentukan juga dapat diketahui desa-desa yang memiliki tantangan lebih kompleks untuk mencapai tujuan *Sustainable Village* yang ditampilkan pada grafik 3 di bawah ini:



Gambar 3. Desa dengan Tantangan Lebih Kompleks untuk Mencapai Sustainable Village berdasarkan Kategori Anggaran yang Mendukung Keberlanjutan

Grafik ini menunjukkan desa-desa dengan total pengeluaran rendah dalam kategori yang mendukung keberlanjutan, yang dapat menjadi indikasi bahwa desa-desa ini akan mencapai tujuan desa berkelanjutan lebih lambat dibandingkan dengan desa-desa yang memiliki pengeluaran lebih tinggi.

Berdasarkan grafik tersebut diperoleh bahwa Tegalrejo dan Rowoindah adalah dua desa dengan pengeluaran terendah, diikuti oleh Tegalsari dan Gugut. Pengeluaran yang rendah dalam kategori ini mengindikasikan kurangnya investasi dalam inisiatif keberlanjutan seperti infrastruktur ramah lingkungan, program pendidikan keberlanjutan, atau upaya konservasi. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh dari keterbatasan anggaran, prioritas yang berbeda, atau tantangan lainnya.

Pendekatan *Sustainable Village* dapat diterapkan dengan dana yang ada dan memerlukan perencanaan yang matang serta kerja sama dari seluruh elemen masyarakat desa. Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan harus melekat dalam setiap kegiatan yang dibiayai oleh dana desa, dengan fokus pada kegiatan jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan saat ini tetapi juga melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang. Pengeluaran yang tinggi tidak secara otomatis menjamin pencapaian keberlanjutan yang lebih efektif atau cepat, karena efektivitas penggunaan anggaran juga sangat penting. Namun, asumsi awal bisa dibuat bahwa ada korelasi antara tingkat pengeluaran dan kemajuan menuju tujuan desa berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan efektif anggaran Dana Desa merupakan kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, termasuk konsep *Green Village*. Pendekatan *Village Social Responsibility (VSR)* memungkinkan desa memanfaatkan dana tersebut untuk inisiatif yang mendukung keberlanjutan lingkungan, selain peningkatan infrastruktur dan layanan dasar. Desa-desa seperti Yosorati, Mulyorejo, dan Darungan yang memiliki pengeluaran lebih tinggi di kategori yang mendukung keberlanjutan seperti infrastruktur, pendidikan, dan inisiatif ramah lingkungan, menunjukkan probabilitas lebih cepat dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Ini mengindikasikan bahwa desa-desa tersebut mungkin lebih maju dalam mengimplementasikan pendekatan *Village Social Responsibility (VSR)* dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan.

Di sisi lain, desa-desa dengan pengeluaran rendah seperti Ampel dan Curahkalong mungkin menghadapi tantangan lebih besar atau memiliki prioritas lain yang mungkin menghambat fokus mereka pada keberlanjutan. Meskipun demikian, rendahnya pengeluaran ini juga bisa menandakan efisiensi anggaran atau adanya inisiatif keberlanjutan yang tidak tergantung pada anggaran besar. Pengeluaran terbesar yang tercatat adalah pada pos Belanja Tidak Terduga dan Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan, yang menunjukkan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan kesiapan dalam menghadapi situasi tak terduga. Pos-pos anggaran ini, bersama dengan investasi pada belanja modal irigasi/embung/drainase/air limbah/persampahan, dan belanja modal gedung, bangunan dan taman, dapat digunakan untuk mendukung prinsip-prinsip *Sustainable Village* jika dikelola dengan bijak dan berorientasi keberlanjutan.

Pada akhirnya, kemampuan desa untuk bertransformasi menjadi *Sustainable Village* tergantung pada seberapa efektif penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas keberlanjutan. Selain itu, pendekatan holistik yang melibatkan semua stakeholder desa serta integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam setiap aspek pembangunan desa akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa saat ini dan menjamin kesejahteraan generasi mendatang.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi generalisasi temuan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian ini terbatas pada analisis data anggaran pendapatan dan belanja desa dari 223 desa di Kabupaten Jember, yang mungkin tidak mencerminkan kondisi di desa-desa lain di Indonesia dengan kondisi sosioekonomi atau geografis yang berbeda. Kedua, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang, meskipun informatif, mungkin tidak selalu mencerminkan realitas terkini atau kompleksitas operasional sebenarnya di desa-desa tersebut. Selanjutnya, penggunaan metode kuantitatif deskriptif menyediakan gambaran yang berguna namun tidak dapat menangkap perspektif subjektif penduduk desa atau mengevaluasi dampak sosial dari alokasi anggaran secara mendalam.

Saran untuk Penelitian Lanjutan

Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk mengadakan studi kasus di beberapa desa dengan kondisi yang beragam untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif tentang pengelolaan Dana Desa dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Penelitian mendatang dapat juga menggabungkan metode kualitatif, seperti wawancara mendalam atau kelompok fokus, untuk memahami persepsi, motivasi, dan tantangan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan desa secara lebih baik. Selain itu, membandingkan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jember dengan kabupaten lain dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai praktik terbaik dan tantangan umum dalam pencapaian *Sustainable Village*. Akhirnya, evaluasi jangka panjang atas dampak kebijakan terkait dana desa terhadap kemajuan keberlanjutan desa akan menjadi tambahan yang berharga untuk literatur dalam bidang ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adnan, H., 2019. Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa terhadap Pemerintahan Desa. *Al'Adl XI*, 151-172.
- Antlöv, H., Wetterberg, A., Dharmawan, L., Bank, W., n.d. Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia.
- Arham, I., Sjaf, S., Darusman, D., 2019. Strategi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Pedesaan Berbasis Citra Drone (Studi Kasus Desa Sukadamai Kabupaten Bogor). *Jurnal Ilmu Lingkungan 17*, 245. <https://doi.org/10.14710/jil.17.2.245-255>

- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R.H., Wardhana, I.W., Setiawan, H., Damayanty, S.A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A.H., Ariutama, G.A., Djuned, P., Rahman, A.B., Handoko, R., 2020. Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *J Rural Stud* 79, 382-394. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>
- Ayu Purnamawati, I.G., Yuniarta, G.A., Jie, F., 2023. Strengthening the role of corporate social responsibility in the dimensions of sustainable village economic development. *Heliyon* 9. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15115>
- Cuadrado-Ballesteros, B., Bisogno, M., 2022. Budget transparency and financial sustainability. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* 34, 210-234. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2022-0025>
- Daeli, W., Tauhid, K., Maharani, C., Moeliono, M., Bong, I.W., 2016. Dari partisipasi ke inklusi: Pembelajaran dari desain dan pelaksanaan proyek pembangunan di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. *Infobrief CIFOR*. <https://doi.org/10.17528/cifor/006336>
- Damastuti, E., de Groot, R., 2017. Effectiveness of community-based mangrove management for sustainable resource use and livelihood support: A case study of four villages in Central Java, Indonesia. *J Environ Manage* 203, 510-521. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.07.025>
- Dharmawan, A.S., Sasmita, A.A., 2023. Pembangunan Berkelanjutan dalam Menghadapi Krisis Lingkungan, in: *Seminar Nasional Sosiologi Unram*. pp. 20-36.
- Frost, G., Rooney, J., 2021. Considerations of sustainability in capital budgeting decision-making. *J Clean Prod* 312. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127650>
- Hapsoro, N.A., Bangun, K., 2020. Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan dilihat dari Aspek Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Arsitektur* 03, 88-97.
- Hege, E., Brimont, L., Pagnon, F., 2019. Sustainable development goals and indicators: Can they be tools to make national budgets more sustainable? *Public Sector Economics* 43, 423-444. <https://doi.org/10.3326/pse.43.4.5>
- Hulu, Y., Harahap, R.H., Nasutian, M.A., 2018. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, 146. <https://doi.org/10.24114/jupii.v10i1.9974>
- Maksimilianus, A., Agung, G., Riska, W., Maulida, R., 2020. Perencanaan dan Pengembangan Desa.
- Nurjaman, R., 2015. Dinamika dan Problematika Implementasi Undang-Undang Desa: Pembelajaran dari Tiga Daerah di Jawa Barat. *Jurnal Desentralisasi* 13, 47-61.
- P3DI Setjen DPR RI, 2015. Pembangunan berkelanjutan: dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- Paru, S., Kaunang, M., Sumampouw, I., 2019. Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2, 1-11.
- Permatasari, P., Iman, A.S., Tilt, C.A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R.H., Rahman, A.B., Samosir, A.P., Wardhana, I.W., 2021. The village fund program in indonesia: Measuring the effectiveness and alignment to sustainable development goals. *Sustainability (Switzerland)* 13. <https://doi.org/10.3390/su132112294>
- PerPres Republik Indonesia Nomor 111, 2022. Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Raharjo, P., Kabupaten Bangka, A., Belitung, B., Skripsi, P., Mayor, D.E., Sos, S., Ba, M., n.d. **DINAMIKA POLITIK LOKAL DALAM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**

BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2021 DESA AIR RUAI KECAMATAN PEMALI
KABUPATEN BANGKA.

- Sajangbati, Y.C., 2015. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Lex Administratum III*, 24-33.
- Sarifuddin, S., Madani, M., Fatmawati, F., 2022. Optimizing the Utilization of Village Funds for Sustainable Village Development in Majene, Indonesia. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy* 3, 59-69. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v3i1.50>
- Soleh, A., 2017. Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai* 5, 32-53.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cetakan Ke. ed. Alfabeta, Bandung.
- Supangkat Samidjo, G., Wibowo, S., Sutrisno, S., 2016. Pengembangan Desa Wisata Belajar Berbasis Potensi Alam dan Pertanian di Polengan, Srumbung, Magelang. *BERDIKARI: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks* 4. <https://doi.org/10.18196/bdr.415>
- Tarlani, Sirajuddin, T., 2020. Rural development strategies in Indonesia: Managing villages to achieve sustainable development, in: *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Institute of Physics Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/447/1/012066>
- Yusuf Maolani, D., 2019. Strengthening Village and Village Government towards Sustainable Development in The Framework of Increasing Community Welfare. *JISPO* 9.